

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- A Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill
- C.F.G., Haryono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Fatmawati, 2005, HAK MENGUJI (TOETSINGRECHTS) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum INDONESIA, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gordon Scott, 1991, *The History and Philosophy of Social Science*, London: Routledge
- Green Mind Community, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State*, Jakarta: Bee Media
- Herman Sihombing, 1996, *Hukum tata negara darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- H.R. Otje Salman, dk., 2009, *TEORI HUKUM Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, 2009, Bandung: Refika Aditama
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *“Teori-Teori Hukum”*, Malang: Setara Press.
- Imam Syaukani, Dk, 2021, *Dasar-dasar POLITIK HUKUM*, Jakarta: Rajawali Press.

- J.C.T. Simorangkir, 1984, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet. I, Jakarta: Ind Hill-Co.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan MK
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum tata negara darurat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta: konpress
- Moh. Mahfud MD, 2010, *MEMBANGUN POLITIK HUKUM, MENEGAKKAN KONSTITUSI*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- Philippe Nonet, dk., 2015, *Hukum Responsif*, Bandung: Ujung Media
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Roberto M. Unger, 2007, *Teori Hukum Kritis*, Jakarta: Nusa Media
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2009, *HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL SUATU TINJAUAN TEORETIS SERTA PENGALAMAN-PENGALAMAN DI INDONESIA*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

- Taufiqurrohman Syahuri, 2023, *Teori Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim KRHN, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan,
- Wicipto Setiadi, *Ilmu Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: damera press, 2022
- Wojowarsito, 1987, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hove

Disertasi

- Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi doktor, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.

Tesis

- Angga Armada Yoga Shogama, 2023, “UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF ILMU PERUNDANG-UNDANGAN”, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Asri Rezki Saputra, 2022, *PROBLEMATIKA FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Handoyo Prihatanto, 2009, “POLITIK HUKUM PENGGUNAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) TERKAIT DENGAN ASAL IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA (Analisis Terhadap Perrpu No. 1 Tahun 2007), Tesis Magister, Universitas Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Fahri Bachmid, 2023, “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, Jurnal, Universitas Muslim Indonesia.
- Faisal, 2014, *MENELUSURI TEORI CHAOSS DALAM HUKUM MELALUI*

PARADIGMA CRITICAL THEORY, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei- Agustus 2014, Universitas Diponegoro

Irwan Triadi, Dkk, Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren Vol. 2, No. 2, Tahun 2024

Jerome Frank, “*Mr. Justice Holmes and Non-Euclidian Legal Thinking*,” Cornell Law Quarterly 17:1932)

James William Hurst, “*Problems of Legitimacy In The Contemporary Legal Order*”, Okrahoina Law Review 24 (1971)

Kendry Tan, 2022, “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA”, Jurnal, Universitas Internasional Batam

M. Reza Saputra, Dkk, Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia, : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Volume. 2, Nomor. 4, Tahun 2024

Richard H. Fallon, Jr., 1997, “*The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse*”, dalam Columbia Law Review, Volume 97, No. 1

Satjipto Raharjo, 2004, ‘Hukum Progresif: Penjelasan Suatu Gagasan’, makalah Disampaikan Pada Jumpa Alumni Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 4 september 2004

Satjipto Raharjo, 2004, ‘Menuju Produk Hukum Progresif’, Makalah Diskusi Terbatas Pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 24 juni 2004

Satjipto Raharjo, 2005, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Journal Hukum Progresif, vol. 1/no. 1/April 2005, PDIH UNDIP, Semarang

Taufiqurrahman Syahuri, Dk, 2023, PEMBATASAN IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, JURNAL YUDISIAL Vol. 16 No. 3 Desember 202, KOMISI YUDISIAL REPUBLIK Indonesia

Wicpto Setiadi, 2020, SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN OMNIBUS LAW, Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 1, April 2020

Wicpto Setiadi, Dkk, 2024, *The Urgency of Implementing Meaningful Participation in Forming Laws in Indonesia*, IJSSHR, Volume 07 Issue 03 March 2024

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

Dokumen Pendukung Lain

Iktisar Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Undang-Undang Cipta Kerja

Notulensi Rapat DPR RI 14 April 2020

Notulensi Rapat DPR RI 3 Oktober 2020

Internet

- Ady Thea DA, Melihat Dampak Perppu Cipta Kerja Bila Disetujui Jadi UU, 15 Februari 2023, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-perppu-cipta-kerja-bila-disetujui-jadi-uu-lt63ecb62b7cc38/?page=2>.
- Andrean W. Finaka, Indonesia Baik ide, Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja, diakses pada 30 jni 2025, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>
- Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, diakses pada 2 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/Perubahan%20sosial>
- BBC News, 2020, 'Omnibus Law: Jokowi Persilakan Penolak UU Cipta Kerja Gugat Ke MK, Setelah Demonstrasi Besar Di Berbagai Kota', 5 Oktober 2020 diperbarui 9 Oktober 220, diakses 24 April 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54410069>.
- Miftah H Yusufpati, Sindo News 2020, '[Sekali Tepuk, RUU Cipta Kerja Buldoser Undang-Undang Tentang Paten \(Sindonews.Com\)](https://nasional.sindonews.com/berita/1539076/12/sekali-tepuk-ruu-cipta-kerja-buldoser-undang-undang-tentang-paten)', 27 Februari 2020, Diakses 2 April 2024. <https://nasional.sindonews.com/berita/1539076/12/sekali-tepuk-ruu-cipta-kerja-buldoser-undang-undang-tentang-paten>
- Nano Tresna A./Lulu A, MKRI 2021, 'MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun', 25 November 2021, Diakses 3 April 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17816>
- Rini Kustiasih, KOMPAS 2021, '[Kerja Legislasi Dikritik, Tetapi Pengawasan DPR Terhadap Penanganan Pandemi Diapresiasi - Kompas.Id](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/28/kerja-legislasi-dikritik-tetapi-pengawasan-dpr-terhadap-penanganan-pandemi-diapresiasi-kompas.id)', 28 Oktober 2021. Diakses 2 April 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/28/kerja-legislasi-dikritik-tetapi-pengawasan-ada-apresiasi>
- [Sadryna Evanalia](#), Kompas.tv, Rekam Jejak Omnibus Law UU Cipta Kerja, diakses pada 30 Juni 2025, <https://www.kompas.tv/nasional/114275/rekam-jejak-omnibus-law-uu-cipta-kerja>,